

**ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI  
KOTA SEMARANG**

Oleh :

Eko Sri Lestari – 14010111130059

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Early Childhood Education (ECD) is currently quite got the attention of the government since early childhood have a positive impact on the state of the future generation. Therefore, all regions in Indonesia strive for early childhood services to the public in the area including Semarang City. Researchers conducted this study in order to determine the implementation of early childhood programs in the city of Semarang.

The approach used in this research is descriptive qualitative with interviews data collection methods and document study. Researchers will look at how the relationship between the parties involved in the implementation process of early childhood in the Semarang City, namely the relationship between the Government and the people of Semarang. Researchers used the concept of public private partnership to analyze the cooperation between the Government of Semarang with society in the implementation of early childhood in the city of Semarang. Through this study, researchers will discover the role of the actors involved in the implementation of early childhood in the city, so it can look at the interdependence between the parties involved.

Keywords: Early Childhood Education, Cooperation, Public Services

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan kualitas kehidupan seseorang. Pendidikan anak dapat ditempuh melalui jalur formal, non formal, maupun informal. Meningkatkan mutu pendidikan adalah salah satu langkah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah membuat beberapa program untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, salah satunya adalah program dalam bidang pendidikan yang dibuat khusus untuk anak-anak pada usia dini yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini pada awalnya dibentuk karena tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan anak sebelum jenjang sekolah dasar masih cukup rendah. Memberikan pendidikan untuk anak memang seharusnya diberikan sejak anak dalam usia dini untuk membentuk pribadi anak agar lebih siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini memberikan pondasi yang kuat bagi anak agar di kemudian hari anak bisa menjadi sosok manusia berkualitas yang nantinya tampil sebagai generasi penerus bangsa yang siap berkompetisi di era globalisasi. Tahun ini, alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak Rp 676,2 miliar. Sebanyak 324 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD bagi 45.000 lembaga. Selain itu, Direktorat Jenderal PAUDNI mengalokasikan bantuan untuk mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru pada tahun 2013.<sup>1</sup>

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah mulai dikembangkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia salah satunya adalah Kota Semarang yang tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu POS PAUD (Satuan PAUD Sejenis) dan PAUD (Kelompok Bermain). Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk masyarakat memiliki prinsip yaitu dari, oleh,

---

<sup>1</sup>“Pemerintah Alokasikan Rp 2,40 Tiliun untuk PAUD Nonformal dan Informal”. Kompas.com. 28 Oktober 2013. Diakses pada 30 Oktober 2013

dan untuk masyarakat yang dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-royong, kerelaan, dan kebersamaan.

Beberapa satuan pendidikan PAUD yang dikembangkan di Kota Semarang bertempat di balai kelurahan atau di balai RW yang tersedia yang di daerah tersebut untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tidak sedikit pula satuan pendidikan PAUD yang telah memiliki tempat pribadi untuk melaksanakan proses belajar mengajarnya. Satuan pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga dikembangkan di salah satu kawasan pasar di Kota Semarang yaitu di wilayah Pasar Johar yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekitar Pasar Johar yang jauh dari dunia pendidikan karena memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi.

**Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2010-2014**

No.	Kecamatan	Tahun				
		2011	2011	2012	2013	2014
1.	Semarang Selatan	58	80	80	80	81
2.	Semarang Timur	61	62	62	61	63
3.	Semarang Barat	108	105	108	106	109
4.	Semarang Utara	70	95	97	68	81
5.	Semarang Tengah	63	65	74	79	68
6.	Ngaliyan	69	75	96	94	94
7.	Pedurungan	132	132	132	139	137
8.	Mijen	52	56	64	61	75
9.	Genuk	81	89	92	91	101
10.	Gunungpati	65	70	87	88	88
11.	Tembalang	113	121	129	144	144
12.	Banyumanik	112	119	128	130	130
13.	Gajahmungkur	49	50	50	59	55
14.	Gayamsari	44	46	51	53	53
15.	Tugu	23	25	28	27	27
16.	Candisari	50	53	53	55	55
	<b>Kota Semarang</b>	<b>1150</b>	<b>1242</b>	<b>1331</b>	<b>1335</b>	<b>1365</b>

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Menurut laporan Dinas Pendidikan di Kota Semarang pada tahun 2013 dari 121.101 anak usia dini (0-6 tahun), jumlah anak yang sudah terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hanya 65.633 anak.<sup>2</sup> Masih rendahnya

<sup>2</sup> Laporan Tahunan Pendidikan untuk Semua Kota Semarang Tahun 2013

jumlah anak yang terlayani PAUD, antara lain disebabkan<sup>3</sup> (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD yang dapat memberikan layanan bagi anak-anak yang ada disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013 adalah 2916 guru. Dari jumlah tersebut hanya 845 guru yang memiliki ijazah sarjana. Hal ini seharusnya juga mendapat perhatian dari pemerintah agar program ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana program, sehingga mewujudkan PAUD yang menjangkau masyarakat kurang mampu dan tetap berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan program Pendidikan Usia Dini di Kota Semarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerataan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, dan *Public Private Patnership* (PPP).

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menekankan pada penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang. Data – data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari wawancara dan studi dokumen, kemudian penulis analisis dengan melakukan reduksi data, dan interpretasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Web/situs resmi PAUDNI <http://paudni.kemdikbud.go.id/wp.../2012/.../JUKNIS-RKB-2012-Final.pdf>. Diakses pada 20 September 2013

Kebijakan yang berpihak pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa depan yang lebih baik. Melalui program PAUD yang berkualitas, maka sumber daya manusia yang lebih berkualitas dapat dicapai. Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa dikuasai oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Program PAUD di Kota Semarang berada di bawah penanganan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dimana terdapat seksi PAUD yang memiliki fokus kerja mengembangkan layanan PAUD di Kota Semarang. Berdasarkan berita daerah Kota Semarang Nomor 24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang Pasal 21 menguraikan tentang Tugas Seksi PAUD mencakup:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PAUD;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja dan rencana kerja anggaran di bidang anak usia dini;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang anak usia dini;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian kajian teknis pemberian perijinan dan rekomendasi pendirian serta pencabutan ijin penyelenggaraan PAUD;
5. Menyiapkan bahan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan anak usia dini;
6. Menyiapkan bahan pengidentifikasian kelompok belajar PAUD pada non formal dan informal;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan kurikulum PAUD pada pendidikan non formal dan in formal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum PAUD;
9. Menyiapkan bahan penetapan juklak penilaian hasil belajar PAUD;

10. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan inovasi PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang PAUD;
12. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang PAUD;
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi PAUD;
14. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi PAUD;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan Non formal dan informal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan Program layanan PAUD mempunyai tujuan antara lain:

1. Memberikan model layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
3. Memberikan contoh kepada orangtua dan keluarga tentang cara-cara pemberian rangsangan pendidikan kepada anak untuk dilanjutkan di rumah.
4. Memberikan layanan kesehatan, pelayanan gizi, pengasuhan dan perlindungan anak serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya<sup>4</sup>

### **1. Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang**

Salah satu bentuk program kerja PAUD di Kota Semarang adalah pemerataan akses PAUD untuk masyarakat Kota Semarang. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM dengan kualifikasi tertentu, sehingga pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan menjangkau kualifikasi tersebut. Distribusi pendidikan harus dapat menjangkau ke pelosok negeri dan tidak hanya menjangkau masyarakat kelas ekonomi atas tapi juga masyarakat menengah ke bawah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>5</sup> <http://www.forumindonesiamuda.org/studi-kasus-suku-baduy-dalam-kebudayaan-versus-pendidikan/> diakses pada 15 Mei 2015 pukul 20.15 WIB

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini tercantum dalam:

1. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Kemerdekaan adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Amandemen UUD 1945 (Pasal 28 C ayat 2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini diantaranya melalui program sebagai berikut:

1. Memanfaatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Mengembangkan program Pendidikan Anak Usia Dini bagi kelurahan yang belum terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini, melalui perintisan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, yang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
3. Memberdayakan peran serta masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Menggali berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat/daerah, masyarakat, komunitas bisnis dalam rangka mendukung tercapainya penyebaran dan perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara merata.
5. Menyediakan dukungan dan bantuan bagi instansi dan organisasi terkait dengan layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Mengembangkan berbagai institusi layanan Pendidikan Anak Usia Dini dari, oleh, dan untuk masyarakat

7. Mengembangkan standar, acuan, dan kurikulum penyelenggaraan program layanan perawatan dan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Menyediakan dukungan dan bantuan bagi lembaga yang mengembangkan program layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Mengendalikan mutu layanan program pendidikan Anak Usia Dini secara berjenjang dan berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi.
12. Mengembangkan kebijakan program layanan Pendidikan Anak Usia Dini terpadu terintegrasi.
13. Mendata dan membuat peta program layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kecamatan yang mencakup data lembaga dan sasaran layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi mitra antara lain dengan Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPTKI, IGA, dan lembaga mitra Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
15. Menyebarkan informasi akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini melalui sosialisasi, promosi, dan edukasi baik melalui media cetak dan elektronik.
16. Memperkuat kapasitas kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui pelayanan secara terpadu.
17. Meningkatkan manajemen dan tata kelola layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
18. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2013

**Tabel 2.1 Ketersediaan Jumlah Lembaga PAUD terhadap Jumlah Penduduk Semua Kecamatan di Kota Semarang**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Lembaga	
		2012	2013	2012	2013
1.	Mijen	56.570	57.889	56	61
2.	Gunungpati	75.027	75.885	87	88
3.	Banyumanik	128.225	130.494	128	130
4.	Gajahmungkur	63.430	63.599	50	59
5.	Semarang Selatan	82.931	82.293	80	80
6.	Candisari	79.902	79.709	53	55
7.	Tembalang	142.941	147.564	129	144
8.	Pedurungan	175.770	177.143	132	139
9.	Genuk	91.584	93.439	92	91
10.	Gayamsari	73.584	73.745	51	53
11.	Semarang Timur	78.889	78.622	62	61
12.	Semarang Tengah	127.921	128.026	74	79
13.	Semarang Utara	71.674	71.200	97	68
14.	Semarang Barat	158.981	158.668	108	106
15.	Tugu	30.904	31.279	28	27
16.	Ngaliyan	12.922	122.555	96	94
	Jumlah	1.559.198	1.572.105	1331	1335

Sumber: Kota Semarang dalam Angka Tahun 2012 dan 2013, Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Semarang Tahun 2013

Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini belum merata untuk masyarakat di Kota Semarang, karena terdapat satu kelurahan yang belum memiliki satuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk masyarakat di wilayahnya yaitu Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk. Hal tersebut terjadi karena kondisi penduduk wilayah Terboyo Kulon yang sebagian besar berada di pinggiran dan juga karena wilayah Terboyo Kulon merupakan wilayah tambak, sehingga menyebabkan anak-anak usia dini di wilayah Terboyo Kulon banyak yang bersekolah di luar wilayah Terboyo Kulon seperti bersekolah di wilayah Terboyo Wetan. Pada tahun ini pemerintah Kota Semarang melakukan koordinasi dengan PKK kelurahan Terboyo Kulon untuk merintis sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah tersebut agar anak-anak di wilayah tersebut dapat bersekolah di wilayahnya sendiri.

Dalam upaya pemerataan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, masing-masing pihak yang terlibat dalam program memiliki hambatan-hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Bagi Pemerintah Kota Semarang, dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pemerintah Kota Semarang memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia yang tersedia. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya mempunyai 4 (empat) pegawai yang bertanggung jawab untuk menangani masalah Pendidikan Anak Usia Dini. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia ini mengakibatkan waktu dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab dari sumber daya tersebut menjadi lebih lama. Empat staff yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak semuanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang harus dikerjakan sebagai pegawai Pendidikan Anak Usia Dini karena latar pendidikan yang tidak sesuai. Hal ini yang menjadi hambatan bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.<sup>7</sup>

Sedangkan bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini masalah Sumber Daya manusia juga merupakan faktor penghambat peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini adalah tenaga pengajar. Bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini terlebih lagi bagi lembaga yang dikelola oleh masyarakat mengalami masalah dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas.

b. Keterbatasan Tempat Belajar Mengajar

Sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar komitmen masyarakat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki masalah dalam hal penyediaan tempat untuk kegiatan belajar mengajar.<sup>8</sup>Lembaga Pendidikan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmat Juri, S.Pd, M.Si, Kasie Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Semarang pada hari Senin, 4 Mei 2015 pukul 08.00 WIB

<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Papat Kurniasih, Pengelola PAUD Bina Siwi pada hari Kamis, 7 Mei 2015 pukul 16.00 WIB

Anak Usia Dini yang dikelola oleh masyarakat tidak memiliki tempat belajar mengajar yang tetap sehingga proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan meminjam fasilitas umum yang ada di daerahnya. Sedangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mandiri (swasta) memiliki tempat pribadi untuk proses kegiatan belajar mengajar sehingga kondisi belajar mengajar menjadi lebih nyaman dan berkualitas.

Pemerintah Kota Semarang sudah mengembangkan PAUD untuk kelurahan di Kota Semarang, akan tetapi wilayah-wilayah yang memiliki kebutuhan khusus seperti pasar Johar pemerintah kota belum menyediakan layanan PAUD untuk masyarakat di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut terdapat banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan PAUD untuk anaknya karena kondisi kehidupan sosial yang sangat memprihatinkan.<sup>9</sup> Anak-anak di wilayah yang tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi banyak dari anak-anak tersebut belum dapat merasakan layanan pendidikan seperti yang mereka butuhkan. Anak-anak di wilayah tersebut harus dibekali dengan berbagai ketrampilan agar dapat merubah kehidupan sosial mereka dan siap untuk menghadapi tantangan global. Berdasarkan masalah di atas beberapa kelompok masyarakat yang memiliki keprihatinan akan kondisi tersebut mulai mengembangkan layanan PAUD seperti yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi pelayanan yang berada di kelurahan dan di Pasar Johar tentu memiliki perbedaan, oleh karena itu peneliti menganalisis perbedaan kondisi PAUD yang di kelola oleh masyarakat dengan PAUD yang berada di kawasan Pasar Johar.

a. PAUD yang di kelola oleh masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang dikelola oleh kelurahan. Kelurahan memberdayakan adanya kelompok organisasi wanita di

---

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara dengan Mas Irwan, Relawan Rumpin Bangjo pada hari Senin 11 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

daerahnya (PKK). Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan agar masyarakat mau berpartisipasi pada program-program di wilayahnya.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada awalnya dibentuk karena adanya kewajiban bagi setiap kelurahan di Kota Semarang untuk memiliki minimal satu Pos PAUD. Hal tersebut mendorong semua kelurahan yang ada di Kota Semarang untuk memberdayakan peran PKK agar mampu mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya. Satuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh masyarakat pada umumnya memiliki tujuan sosial yaitu untuk menjangkau masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah agar masyarakat mendapatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini tanpa dibebani oleh mahalnnya biaya pendidikan. Anak-anak usia dini diarahkan untuk dapat belajar sambil bermain di sekolah.<sup>10</sup>

Pendidikan Anak Usia Dini di daerahnya. Banyak lembaga yang di kelola oleh masyarakat belum memiliki tempat yang tetap, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PAUD-PAUD tersebut menggunakan fasilitas umum yang ada di daerahnya seperti, di Masjid, Balai Kelurahan atau Balai RW, dan rumah dinas dari Kepala Kelurahan.<sup>11</sup> Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh masyarakat pada umumnya menganut asas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dikelola oleh masyarakat sendiri dan memberi dampak untuk masyarakat itu sendiri. Dengan asas tersebut diperlukan adanya peran serta dari masyarakat. Masyarakat diajarkan untuk ikut berpartisipasi aktif untuk keberhasilan PAUD yang berada di daerahnya supaya masyarakat tersebut dapat berdaya dan berkembang.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Murtini, Pengelola PAUD Puru Hita Haniti pada hari Rabu, 6 Mei 2015 pukul 15.30 WIB dan Berdasarkan wawancara dengan Ibu Papat Kurniasih, Pengelola PAUD Bina Siwi pada hari Kamis, 7 Mei 2015 pukul 16.00 WIB

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Murtini, Pengelola PAUD Puru Hita Haniti pada hari Rabu, 6 Mei 2015

Tenaga pengajar untuk lembaga PAUD yang dikelola oleh masyarakat bukan berasal dari tenaga pengajar profesional, karena sebagian besar diambil dari kader-kader PKK yang bersedia dan mampu untuk melayani anak-anak usia dini tetapi tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendidik. Berbeda jika dibandingkan dengan tenaga profesional dari lembaga PAUD yang dikelola swasta karena akan mengutamakan kualitas tenaga pengajarnya.

b. Lembaga PAUD di Kawasan Pasar Johar

Pasar Johar berada di sebelah barat Pasar Semarang yang disebut Pasar Pedamaran. Kawasan Pasar Johar merupakan area pusat jual-beli di Kota Semarang yang terkenal dengan kelengkapan komoditinya dan menjadi pusat destinasi belanja masyarakat Semarang. Kawasan Pasar Johar berada di pusat Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Kelurahan Kauman. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Johar, sehingga semakin banyak pendatang yang pindah ke kawasan Pasar Johar untuk berdagang maupun bekerja.

Alasan utama adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Pasar Johar ini dikarenakan banyaknya anak-anak dari pedagang ataupun pekerja di Johar yang belum tersentuh oleh pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diadakan oleh Pemerintah.<sup>12</sup>

PAUD di kawasan Pasar Johar dilaksanakan pada sore hari yang di pusatkan di dua pasar yaitu PAUD Yaik dan PAUD Kanjengan. Yang membedakan PAUD yang dikembangkan di Pasar Johar dengan PAUD yang dikelola oleh masyarakat adalah PAUD ini tidak memiliki kurikulum yang menjadi acuan dalam proses belajar mengajar seperti PAUD pada umumnya. Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara konstektual. Tenaga pengajar yang ada semuanya adalah relawan, untuk PAUD sendiri kebetulan di bina oleh relawan yang merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan PAUD.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara dengan Mas Irwan, Relawan Rumpin Bangjo pada hari Senin, 11 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

## **1. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang**

Pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang menggunakan bentuk kerjasama *Public Private Patnership* dimana pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan pihak swasta untuk mewujudkan pelayanan publik. Pihak swasta yang dimaksud disini adalah masyarakat dan organisasi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan secara mentah kepada masyarakat melainkan pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjalankan pelayanan tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu mengenali kebutuhan yang mereka perlukan, memampukan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri.

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini, pemerintah Kota Semarang mengembangkan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi antara lain Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPT, IGA, dan lembaga mitra Pendidikan Anak Usia Dini lainnya. Dalam kerjasama ini pemerintah melibatkan adanya peran dari masyarakat maupun organisasi masyarakat karena bertujuan untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini yaitu tentang analisis program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang dapat diambil kesimpulan bahwa Program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Semarang belum merata untuk setiap kelurahan di Kota Semarang, karena terdapat satu wilayah

---

<sup>13</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmat Juri, S.Pd, M.Si, Kasie Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Semarang pada hari Senin, 4 Mei 2015 pukul 08.00 WIB

yang belum mampu menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat di wilayahnya yaitu Kelurahan Terboyo Kulon.

Dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dengan masyarakat dan organisasi masyarakat agar dapat mendorong partisipasi dari masyarakat tersebut. Pemerintah membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk jalannya program Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya masing-masing. Pemerintah juga mengembangkan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi antara lain Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, GOPT, IGA, dan lembaga mitra Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.

Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Sumber Daya Manusia dan keterbatasan tempat belajar mengajar

Pada dasarnya semua jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan peletakan dasar ke arah pertumbuhan, dan perkembangan fisik dan kecerdasan yaitu daya pikir, daya cipta, emosi, spiritual, berbahasa/komunikasi, dan sosial bagi anak. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa PAUD adalah pendidikan Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak hanya dialami anak selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun saja, sedangkan PAUD memiliki batasan usia anak dari lahir sampai 6 (enam) tahun. PAUD merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur non formal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini sedangkan Taman Kanak-kanak merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di bawah naungan Dinas Pendidikan. Di Indonesia, walaupun memiliki tujuan yang sama PAUD dan Taman Kanak-kanak dilaksanakan secara terpisah. Taman Kanak-kanak lebih difokuskan untuk mempersiapkan anak agar mampu menghadapi pendidikan dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Semarang dalam Angka 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik
- Daymon, Cristine dan Immy Holloway. 2008. *Metode-metode Riset dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Dinas Pendidikan Kota Semarang. 2013. *Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2013*. Semarang: Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Djaelani, Annu Rofiq. 2013. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. Vol: XX (No:1). Hal 6-8
- Hasan, Maimunah. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press
- Hendayady, Agus. 2011. "Pemberdayaan Aparatur Daerah (Tealaaah Teoritis Terhadap Kinerja Aparatur Daerah)", dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol 1
- Priyatno Harsastro. Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta. Forum *Rubiyantoro, Yohan*. 2013. "Pemerintah Alokasikan Rp 2,40 Triliun untuk PAUD Nonformal dan Informal. *Kompas*. 28 Oktober 2013. Jakarta
- Saroni, Mohammad. 2010. *Orang Miskin Harus Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIB-UPI. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- Widjajanti, Kesi. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12. Juni. Hlm.15-27
- Islam, Ana Jauharul. 2011. *Pelayanan Publik dalam paradigma baru "The New Public Service"*

### Internet

(<http://chicha14.blogspot.com/2011/04/pelayanan-publik-dalam-paradigma-baru.html>) diakses pada 5 Oktober 2013

Syarifah, Fitri. 2013. BKKBN: Tahun Ini Penduduk Indonesia Capai 250 Juta Jiwa

(<http://health.liputan6.com/read/521272/bkkbn-tahun-ini-penduduk-i-250-juta-jiwa>) diakses pada 20 September 2013

(<http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.in/2013/12/cara-prosedur-dan-syarat-pendirian-paud.html?m=1/>) diakses pada 4 Juni 2015 pukul 04.00 WIB

<http://prezi.com/gm4fzza71ytr/paud-di-jepang/> diakses pada 4 Juni 2015 pukul 6.06 WIB

<http://www.forumindonesiamuda.org/studi-kasus-suku-baduy-dalam-kebudayaan-versus-pendidikan/> diakses pada 15 Mei 2015 pukul 20.15 WIB

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, Pasal 28 ayat 1  
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009